

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ruslan Abu Bakar melakukan penelitian tentang penerapan akad *mudharabah* di bank muamalat cabang Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Penelitian di bank muamalat Indonesia cabang malang, secara umum menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan *mudharabah* di bank muamalat Indonesia cabang malang cenderung pada hal-hal yang bersifat konsumtif, dengan usaha seperti koperasi, sedangkan masalah agunan atau jaminan tetap diberlakukan tapi berupa *cash* atau hak tagih dari nasabah koperasi dan kriteria koperasi yang menjalin kerjasama dengan bank muamalat Indonesia cabang malang dengan syarat sudah didirikan minimal 2 tahun dan sudah melakukan rapat anggota tahunan sebanyak 2 kali dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.¹⁵

Penelitian oleh Tri Maulida Sarah yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berjudul *Analisis Perbandingan Penentuan Nisbah Berdasarkan Metode Profit Sharing Dan Revenue Sharing Pada Pembiayaan Mudharabah*, dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan metode pencatatan bagi hasil yang digunakan, bank muamalat Indonesia cabang malang menggunakan metode *revenue sharing* sebagaimana metode *revenue sharing* pada perhitungan bagi hasil bank dan teori yang

¹⁵ Ruslan Abu Bakar, *Penerapan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah, Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Malang* (ditulis untuk menempuh gelar sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang 2014). Hal 2

digunakan sama. Pengembalian pembiayaan nisbah pada proyeksi angsuran yang diterima bank perbulannya pada *revenue sharing* dibayar terpisah dengan porsi angsuran bagi hasil. Dalam penelitian ini juga menyatakan jika penggunaan metode *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasil dari pengembalian pembiayaan proyeksi angsuran, nisbah bank, dan nisbah bagi hasil dalam rupiah maka tampak lebih menguntungkan penentuan nisbah berdasarkan metode *revenue sharing*, tetapi, bank syariah lebih mengedepankan hukum Islam dimana transaksi simpan pinjam sesuai dengan teori harus berdasarkan kepada keadilan, persaudaraan dan pertanggungjawaban.¹⁶

Penelitian Mulyani yang berjudul “Pelaksanaan prinsip syariah atas pemberian pembiayaan pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang Malang. ”Jenis penelitian ini adalah studi empiris yang dijelaskan secara deskriptif, artinya data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data secara lisan berupa deskripsi kegiatan operasional bank syariah menyangkut fenomena yang diteliti. Penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan prinsip syariah pada bank syariah muamalat cabang Malang dalam penelitian ini diambil kesimpulan bahwa prinsip – prinsip syariah telah berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan konsumen hasil ini didukung oleh jawaban responden yang rata – rata setuju terhadap prinsip – prinsip syariah yang selam ini diterapkan oleh

¹⁶ Tri Maulida Sharah, *Analisis Perbandingan Penentuan Nisbah Berdasarkan Metode Profit Sharing Dan Revenue Sharing Pada Pembiayaan Mudharabah* (untuk menempuh gelar sarjana akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang 2012). Hal.2

bank. Faktor penghambat bagi penerapan prinsip syariah adalah berkaitan dengan sosialisasi produk –produk syariah.¹⁷

Penelitian Rifqi yang berjudul “Pelaksanaan prinsip syariah di bank bri kantor cabang syariah malang ”Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan prinsip syariah pada bank bri kantor cabang syariah malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank bri syariah telah memiliki 250 nasabah untuk penghimpunan dana dan 52 pembiayaan dan memiliki 17 karyawan, karena kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni tentang produk bank syariah serta belum adanya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang operasional bank syariah. Maka pelaksanaan prinsip syariah di bank bri kantor cabang malang belum bisa maksimal¹⁸.

Penelitian Indah yang berjudul “Studi normatif pelaksanaan sistem pembiayaan mudharabah (studi pada bank perkreditan rakyat syariah ASRI jember) ”Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, disimpulkan bahwa di BPRS ASRI jember terjadi kenaikan jumlah pembiayaan dan tabungan yang lumayan drastis, itu semua dipicu oleh kebutuhan nasabah akan pembiayaan, dari hasil penelitian ini juga disimpulkan bahwa BPRS ASRI jember telah melaksanakan prinsip syariah dilihat dari isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah islam dan

¹⁷Mulyani Pelaksanaan prinsip syariah atas pemberian pembiayaan pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang malang (untuk menempuh gelar sarjana ekonomi di fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang 2007) hal, 95

¹⁸Rifqi Widyarini, *Pelaksanaan prinsip syariah di bank bri kantor cabang syariah malang*(untuk menempuh gelar sarjana ekonomi di fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang 2005) hal, 72

beberapa hal lain seperti cara penyelesaian masalah yang layak dan bermartabat sesuai ajaran islam.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu dan penelitian ini sama dalam bahasan terkait pelaksanaan prinsip syariah pada bank syariah, atau lembaga keuangan syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini menekankan pada analisis kesesuaian prinsip syariah dengan pelaksanaan dilapangan pada aspek : prinsip penentuan nisbah dan bagi hasil, penyertaan agunan, dan penyelesaian masalah kebangkrutan atau kerugian usaha sedangkan penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan prinsip syariah pada bank dari aspek kesiapan sumber daya manusia, dari aspek pendapat publik, dan ada juga yang membahas dari aspek prinsip syariah pada pembiayaan produktif bank umum syariah kepada lembaga keuangan seperti koperasi dll.

2.2. Bank Syariah

Menurut Antonio terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah. *Pertama*, dari segi akad dan aspek legalitas: akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dengan bank, maka bank syariah dapat

¹⁹Indah Wuryanti, *Studi normatif pelaksanaan sistem pembiayaan mudharabah (studi pada bank perkreditan rakyat syariah ASRI jember)* (untuk menempuh gelar sarjana hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah malang 2007).

merujuk kepada UU No.3 tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menangani perkara perbankan syariah yang penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.²⁰ *Kedua*, Struktur Organisasi: bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Tapi unsur yang membedakan adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.²¹ *Ketiga*, Bisnis dan usaha yang dibiayai: Bisnis dan usaha yang dilakukan tidak terlepas dari saringan syariah.²² *Keempat*, Lingkungan kerja dan *corporate culture*: dalam hal etika sifat *amanah* dan *shiddiq* melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam.²³

Bank syariah adalah suatu lembaga yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana bermasalah dari modal inti dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadhiah*) dan kuasi ekuitas²⁴

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi: (1) prinsip titipan atau simpanan, (2) sistem bagi hasil, (3) sistem jual beli dengan margin keuntungan(sistem sewa) dan sistem jasa,

²⁰ Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Gema insani, (jakarta : 2001). Hal 29

²¹ *Ibid.* Hal 31

²² *Ibid.* Hal 33

²³ *Ibid.* Hal 34

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Rajawali Pers, (Jakarta : 2008). Hal 19

ketigaprinsip ini didasarkan pada konsep yang terdapat dalam fikih muamalah sehingga diyakini sesuai dengan prinsip syariah.²⁵

2.3. Macam-Macam Produk Bank Syariah

2.3.1. Giro Wadhiah

Dana nasabah yang dititipkan bank syariah. Setiap nasabah berhak mendapatkan bonus keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar kebijaksanaan dari bank. Demikian pula nominalnya diupayakan sekompetitif mungkin.

2.3.2. Tabungan Mudharabah

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

2.3.3. Deposito Investasi *Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa tarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

2.3.4. Tabungan Haji *Mudharabah*

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil atau (*mudharabah*).

²⁵*Ibid.* hal 19

2.3.5. Tabungan Qurban

Simpanan pihak ketiga yang akan disimpan untuk ibadah kurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil.

2.4. Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Perbedaan mendasar bank syariah dan bank konvensional menurut Syafii Antonio:²⁶

Tabel 1 : Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
Investasi yang halal dan haram	Melakukan investasi yang halal
Memakai perangkat bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
Profit <i>oriented</i>	Profit dan falah <i>oriented</i> .
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
Tidak terdapat dewan sejenis	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah

Sumber: Syafii Antonio : bank syariah dari teori ke praktik, 2001.

²⁶ Syafii Antonio : *bank syariah dari teori ke praktik*, 2001. Hal 34

Adapun menurut Sudarsono yang dilihat dari segi aspek lainnya yaitu²⁷ :

Tabel 2: Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidak jelasan	Berdasarkan bunga
Operasionalisasi	Dana masyarakat berupa titipan, investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu.	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo
Aspek sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas tertuang dalam visi dan misi	Tidak diketahui secara tegas
Organisasi	Harus memiliki dewan pengawas syariah	Tidak memiliki dewan pengawas syariah

Sumber : Sudarsono: *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah : deskripsi dan ilustrasi*, 2003

2.5. Riba

Kata *riba* berasal dari bahasa arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*alirtifa'*). Sehubungan dengan arti *riba* dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan *riba* terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan). Menurut terminologi ilmu fiqh, *riba* merupakan tambahan khusus yang

²⁷Sudarsono: *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah : deskripsi dan ilustrasi*, 2003. Hal

dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. *Riba* sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh *syara'*, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Berbicara *riba* identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan *riba*. Pendapat itu disebabkan rente dan *riba* merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

2.5.1. Riba Fadhl

Riba fadhl disebut juga *riba buyu* yang timbul akibat petukaran sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawaa'an bi sawaa'in*) dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindak *andzhalim* terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain.²⁸

Riba fadhl adalah pertukaran barang yang sama, dengan kualitas dan jenis yang sama namun dengan kuantitas yang berbeda, sebagai contoh dari menukarkan sekilo beras dengan dua kilo beras milik anto, permasalahan semacam ini termasuk dalam *riba fadhl* karena Rasulullah menyatakan jika transaksi barang dengan

²⁸ Adiwarman, *Riba, Gharar Dan Kaidah – Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fiqh Dan Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta : 2015). Hal 29

jenis dan kualitas yang sama, harus dengan kuantitas yang sama dan waktu yang sama. Itu dinyatakan dalam hadits :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّكُفَ شَيْئُهُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)

2.5.2. Riba Nasiah

Riba nasiah adalah *riba* yang timbul akibat utang – piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghumnu bil-ghumni*) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Nasi’ah adalah penanggungan penyerahan atau penermaan jenis arang yang dipertukarkan dengan barang jenis *ribawi* lainnya. *Riba nasi’ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dan barang yang diserahkan kemudian. Jadi keuntungan muncul tidak dengan resiko dan hasil usaha yang muncul tanpa biaya, keuntungan dan hasil tersebut muncul karena berjalannya waktu.

Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi, memastikan sesuatu yang diluar wewenang adalah kedzaliman. Hal

tersebut justru yang terjadi dalam riba *nasiah*. Yakni memperlakukan sesuatu yang bersifat *uncertain* menjadi *certain*. Pertukaran kewajiban menanggung beban ini dapat menimbulkan tindakan *dzhalim* terhadap salah satu pihak, pihak kedua dan pihak-pihak lain.

Jelasnya ciri dari riba nasiah adalah diambilnya keuntungan tanpa resiko dan diambilnya hasil tanpa biaya. Yang kemudian itu merugikan pihak peminjam, karena nominal dipastikan di awal sedangkan hasil belum tentu bisa berjalan sesuai prediksi nominal yang disyaratkan kreditur.²⁹

2.6. Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Perbedaan bunga dan bagi hasil Syafii Antonio menyatakan sebagai berikut:³⁰

Tabel 3 : Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi hasil
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan bunga dibuat ada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan besarnya rasio nisbah dibuat pada waktu akad berpedoman pada kemungkinan untung rugi
<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipijamkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh

²⁹*Ibid. Hal 13.*

³⁰ Syafii Antonio : *Bank Syariah Dari Tori Ke Praktik*, 2001. Hal 61

<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
<ul style="list-style-type: none"> • Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Keabsahan bagi hasil tidak diragukan lagi oleh semua agama.

Sumber : Syafii Antonio : *Bank Syariah Dari Tori Ke Praktik*, 2001

Begitu juga Veithzal Rifai dan Arifin Ilham menyatakan sebagai berikut:³¹

Tabel 4 : Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Sistem Bunga	Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil sebelum jalannya usaha	Penentuan besarnya hasil sesudah atau seiring berjalannya usaha
Yang ditentukan sebelumnya adalah jumlah besarnya nilai rupiah	Yang ditentukan sebelumnya adalah nisbah presentase bagi hasil
Kerugian ditanggung nasabah jika terjadi kerugian	Kerugian ditanggung kedua belah pihak nasabah dan lembaga
Presentase keuntungan dihitung dari jumlah hutang	Presentase keuntungan dihitung dari jumlah keuntungan nasabah dan belum tentu besarnya
Perhatian usaha pada bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan bank
Besaran pasti diawal: (%) kali jumlah	Proporsi: (%) kali jumlah untung yang

³¹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin : *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi*, 2009. Hal 57

pinjaman yang telah pasti diketahui	belum diketahui
Status hukum berlawanan dengan QS. Luqman: 34	Status hukum tidak berlawanan dengan dengan QS. Luqman: 34

Sumber : Veithzal Rivai, Arviyan Arifin : *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi*, 2009

2.7. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan ketentuan bank Indonesia pada pasal 1 undang-undang no 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan bagi hasil.³²

Menurut Antonio (2001:106) pembiayaan merupakan salah satu tugas bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal :

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

³² Kasmir, *manajemen perbankan, PT Raja Grafindo Persada, (jakarta : 2000). Hal 73*

2.8. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan didasarkan atas pembiayaan, sehingga dengan demikian pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa lembaga pembiayaan akan memberikan pembiayaan ketika nasabah telah memenuhi kriteria dan dapat dipercaya, dengan ketentuan jangka waktu pembayaran nominal, jumlah dan ketentuan lainnya. Menurut Muhammad menyatakan bahwa ada lima unsur yang terdapat pada pembiayaan yaitu :

a. Karakter (*Character*)

Yaitu penilaian karakter calon debitur berupa moral, watak ataupun sifat-sifat personaliti untuk mengetahui sejauh mana itikad baik calon debitur untuk memenuhi perjanjian sesuai yang telah disepakati.

b. Kapital (*Capital*)

Yaitu penilaian atas modal yang dimiliki calon debitur apakah memadai untuk dijalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.

c. Koleteral (*Collateral*)

Yaitu adanya penilaian jaminan yang diserahkan calon debitur untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan dapat menutup resiko kegagalan pengembalian kewajiban debitur.

d. Kondisi Perekonomian (*Condition Of Economy*)

Yaitu pertimbangan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi perkreditan, dan tentu mempengaruhi bisnis debitur. Sehingga dapat memperkecil resiko yang timbul dari kondisi ekonomi secara makro³³.

2.9. Teori Bagi Hasil

Muhammad bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit sharing dalam kasus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: "Distribusi beberapa dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan seluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan kemitraan dan transparansi secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek³⁴.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan *mudharib* dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih

³³ Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, Unit penerbit dan percetakan (UPP) AMPYKPN, (Yogyakarta : 2001). Hal 261

³⁴ *Ibid. Hal 101*

harus dibagi antara *shohibul* dan *mudharib* susai proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan diperjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup ekuiti *shohibul maal* telah terbayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan pendapatan bagi hasil perlu ditentukan dari awal dan diketahui kedua belah pihak, dengan demikian berarti harus ditentukan prinsip perhitungan bagi hasil, apakah menggunakan perhitungan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian. Karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan telah mendapat bagian maka ia tak berhak mendapat lebih besar dari *shahibul maal*. Sedangkan untuk profit sharing bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah*nya hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

2.9.1. Profit Sharing

Pengertian *profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total

pendapatan (total *revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya (total *cost*).³⁵

Didalam istilah lain profit *sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah sering dipakai adalah profit *loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan.

Sistem profit *sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan ekonominya, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan pada awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali investasinya secara utuh ataupun keseluruhan dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Keuntungan didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan akan dilakukan pembagian setelah proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif artinya usaha merugi, positif berarti angka lebih dari sisa

³⁵ Tri Maulida Sharah, *Analisis Perbandingan Penentuan Nisbah Berdasarkan Metode Profit Sharing Dan Revenue Sharing Pada Pembiayaan Mudharabah* (untuk menempuh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah malang 2012). Hal 15

pendapatan. Yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya, nol artinya antara pendapatan dengan biaya-biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) dan meruakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.³⁶

2.9.2. Revenue Sharing

Pengertian *revenue sharing* berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Dan *sharing* adalah bentuk kata kerja artinya share yaitu membagi, bag, atau bagian. *Revenue sharing* berarti bagi hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang didapatkan dari pendapatan penjualan.

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output dan yang dihasilkan dalam kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi. Didalam *revenue* ada unsur yang terdiri dari total biaya dan laba. Laba bersih merupakan laba kotor yang dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa arti *revenue sharing* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang maupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat didalam *revenue sharing*

³⁶*Ibid* hal.16

meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya didalamnya meliputi total capital ditambah profit.³⁷

2.10. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil menurut Antonio terdiri dari dua, yaitu:³⁸

a) Faktor Langsung

1. *Investment Rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh bank syariah. Jika bank menentukan *investment rate* 80%, hal ini berarti 20% dari total dana adalah sisa dana yang tidak diinvestasikan merupakan dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
3. Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan rasio yang harus disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Setiap bank syariah dapat menerapkan nisbah yang berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu,

³⁷*Ibid* hal, 19

³⁸ Sumber: Syafii Antonio : *Bank Syariah Dari Tori Ke Praktik*, 2001. Hal 140

dalam hal ini berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan, serta sesuai dengan besarnya dana yang disalurkan.

b) Faktor Tidak Langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*. a). Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan biaya. Pendapatan yang “bagihasil” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
2. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

2.11. Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah

Ketika bank syariah pertamakali berdiri sering dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil, padahal bagi hasil hanyalah salah satu jenis transaksi yang digunakan oleh bank syariah, menurut Adiwarman Karim bagi hasil merupakan bentuk kontrak investasi atau termasuk dalam *natural uncertainty contracts*.

Pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut Sumitro, *mudharabah* merupakan perjanjian antara pemilik modal (uang/barang) dengan pengusaha (*entrepreneur*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian bagi hasil sesuai perjanjian. Pemilik

modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.³⁹

Menurut Adiwarman Karim akad *mudharabah* merupakan bentuk kontrak antara dua pihak yang mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan dan mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan mendapatkan untung. Singkatnya *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.

2.11.1. Pembagian Akad *Mudharabah*

Menurut Antonio, secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁰

1) *Mudharabah Muthlaqah*.

a) *Shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikan. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

b) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *time deposit* biasa. Dalam *mudharabah muthlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and costumers* pada bank konvensional.

³⁹ Sumitro, *asas – asas Perbankan islam dan lembaga – lembaga terkait (BAMUI dan TAKAFUL)*, PT Raja Grafindo Persada, (jakarta : 2004). Hal 32

⁴⁰ Syafii Antonio : *Bank Syariah Dari Tori Ke Praktik*, PT Raja Grafindo persada (Jakarta :2001). Hal 105

- c) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh penuhnya makna investor. Dia bukanlah *leader* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung, dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
- d) Bank memiliki dua fungsi : kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “kekiri maupun kekanan”, bank harus *sharing risk* dan *return*.
- e) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based services*.

2) **Mudharabah dan Muqayyadah**

- a) *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya.

Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.

- b) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *special investment*.

2.11.2. Prinsip dan Ketentuan Umum Akad *Mudharabah*

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
 - Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, tidak dikenakan saksi administrasi⁴¹.

Prinsip dan ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* menurut adiwarman karim (2001) :

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, Unit penerbit dan percetakan (UPP) AMPYKPN, (Yogyakarta : 2001). Hal 95

- a. Prosentase : keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal riil tertentu.
- b. Bagi untung bagi rugi : ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketidak pastian usaha, karena keuntungan atau kerugian investasi sangat bergantung pada sektor riil usaha nasabah.
- c. Jaminan : namun demikian, ketentuan pembagian kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko usaha, bukan karena kesalahan karakter pelaksana usaha. Jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola maka *shahib maal* tidak perlu menanggung kerugian tersebut.
- d. Penentuan nisbah : penentuan nisbah dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak
- e. Cara penyelesaian kerugian : jika terjadi kerugian usaha penyelesaiannya adalah :
 - a. Diambil dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal
 - b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok hutang.

c) Syarat – syarat terpenuhinya akad *mudharabah*

- Modal yang diserahkan harus dalam bentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk emas atau perak batanga, maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal

- Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka dibatalkan akad anak2 yang masih kecil, orang gila, dan orang – orang ang berada dibawah pengampunan.
- Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya , seumpama 10 % atau 50%.
- Melafadzkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini untuk menjadi modal jika ada keuntungan maka akan dibagi menjadi dua
- *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola untuk berdagang i daerah tertentu, memperdagangkan barang – barang tertentu.
- Dalam *mudharabah* tidak boleh ada syarat – syarat turunan, jika ada maka akad itu batal atau fasik.

2.11.3. Manfaat Akad Mudharabah

Menurut Syafie Antonio akad *mudharabah* memiliki manfaat sebagai berikut:⁴²

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

⁴² Syafii Antonio : *bank syariah dari teori ke praktik*, PT Raja Grafindo persada (Jakarta :2001). Hal 97

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguzntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.11.4. Perbedaan *mudharabah* klasik dan *mudharabah* modern

Pro kontra mengenai kesesuaian bank syariah dengan teori masih banyak menuai perdebatan, salah satunya adalah pola *mudharabah* yang dipraktekkan pada zaman klasik dan pada zaman modern yang berbeda sehingga berimbas pada implikasi yang berbeda pada pola praktek masing – masing⁴³ :

⁴³ Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, Unit penerbit dan percetakan (UPP) AMPYKPN, (Yogyakarta : 2001). Hal

Perbedaan Kotrak *Mudharabah* Klasik dan Modern

no	Mudharabah klasik	Mudharabah modern
1	Kontrak dilakukan perorangan	Kontrak dilakukan antar lembaga (bank syariah) dengan individu terkait.
2	Kontribusi shahibul maal berbentuk barang, dan mudharib usaha menjual barang	Kontribusi hasil shahibul maal berbentuk modal, dan mudharib berbentuk jasa atau pelayanan (baik bank syariah maupun mudharib)
3	Mekanisme akad sederhana, tidak terkait dengan proses produksi, pemasaran dan lain sebagainya.	Mekanisme lebih kompleks karena terkait dengan proses produksi, pemasaran, dan persaingan ketat
4	Kontrak perseorangan menjadikan shahibul maal mengetahui track record si mudharib sebelum mempercayakan barang atau asetnya.	Bank syariah sulit mengetahui track record si mudharib, sehingga sering terdapat ketidak seimbangan informasi antara bank dengan mudharin dan resiko kecurangan yang dilakukan oleh mudharib, sebagai solusi gunakan jaminan dalam akad ini.
5	Metode distribusi bagi hasil cukup mudah karena hanya dengan dua orang dalam kontrak.	Metode dsitribusi bagi hasil cukup rumit, karena pihak bank menerima modal dari banyak shahibul maal dengan waktu yang berbeda, kemudian menginvestasikan modal tersebut kepada macam – macam jenis usaha dengan periode waktu yang

		berbeda – beda . dan si shahibul maal dapat mengambil dapat mengambil modal tersebut sewaktu – waktu sesuai dengan keinginannya.
--	--	--

2.11.5. Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*⁴⁴.

1. Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Rukun Dan Syarat Pembiayaan

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- c. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- d. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- e. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- f. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - g. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - h. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - i. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - j. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - k. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - l. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- m. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- n. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - o. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - p. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - q. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Ketentuan Lain

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.12. Prinsip Dasar Mudharabah

Dalam penelitian ini, peneliti mengkristalkan prinsip – prinsip *mudharabah* di atas ke dalam empat point, yaitu :

- Prinsip penyertaan jaminan

Dalam bagi hasil sebenarnya tidak ada istilah jaminan atau agunan, namun karena untuk menjaga akad dari penyelewengan nasabah jaminan perlu di berikan sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam menjaga putaran dana nasabah dalam bank tersebut⁴⁵. Adiwarman Karim menjelaskan bahwa agunan nantinya dapat dicairkan jika terjadi kerugian karena penyelewengan dan kelalaian *mudharib*⁴⁶.

- Prinsip penentuan nisbah dan bagi hasil .

Penentuan bagi hasil harus ditentukan melalui kesepakatan pada kedua belah pihak, dan juga nsbah ditentukan dalam bentuk prosentase. Pembayaran pekannya juga nasabah membayar dari pembagian hasil usaha dengan prosentase nisbah tersebut.

- Prinsip pembagian kerugian usaha *mudharib*.

⁴⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

⁴⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Edisi Ke Lima, Rajawali Press, (Jakarta: 2015), hal. 07.

ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketidak pastian usaha, karena keuntungan atau kerugian investasi sangat bergantung pada sektor riil usaha nasabah. Karena keuntungan hasil *mudharabah* sangat tergantung pada perkembangan usaha *mudharib* dan bisnis *mudharib* juga mengandung resiko – resiko, oleh karena itu *mudharabah* harus memberi sistem yang flaksibel untuk mengatasi nasabah yang mengalami kerugian⁴⁷



⁴⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Edisi Ke Lima, Rajawali Press, (Jakarta: 2015), hal. 07

